

# WHO-Global Malaria Program Sebagai Wujud Kosmopolitanisme Negara- Negara

*by* Hafid Pradana

---

**Submission date:** 28-Jul-2019 08:10PM (UTC-0700)

**Submission ID:** 1155795643

**File name:** alaria\_Program\_Sebagai\_Wujud\_Kosmopolitanisme\_Negara-Negara.docx (15.01K)

**Word count:** 2546

**Character count:** 18623

## **WHO-Global Malaria Program Sebagai Wujud Kosmopolitanisme Negara-Negara**

*Hafid Adim Pradana*

### **Abstrak**

*Sebagai perspektif yang dominan, Realisme senantiasa melihat hubungan internasional sebagai dunia anarki yang berisikan negara-negara selfish yang senantiasa mengejar kepentingan nasionalnya, tanpa peduli akan kelangsungan hidup negara-negara lain. Berbagai kritik terhadap pandangan realisme kemudian muncul, salah satunya ialah pandangan dari teori normatif yang berupaya untuk memberikan penjelasan tentang isu-isu moral dasar dari hubungan internasional. Dengan mengambil kasus WHO-Global Malaria Program (GMP), dan pendekatan kosmopolitanisme sebagai salah satu aliran dari teori normatif, tulisan ini berupaya menantang pendirian teguh para teoritis realis. Tulisan ini menghasilkan temuan bahwa kepedulian dan komitmen negara-negara dalam menanggulangi penyebaran wabah malaria global melalui WHO-GMP menunjukkan bahwa negara-negara ternyata memiliki aspek moral dalam bertindak terhadap negara-negara lain, termasuk individu-individu yang hidup didalamnya.*

**Kata Kunci: WHO-GMP, Kosmopolitanisme**

### **Abstract**

*As a dominant perspective, realism always look international relations as anarchy containing countries which are constantly pursuing national interest, without caring for the survival of other countries. Criticism of the view of realism emerged, one of which is a view of a normative theory that attempts to provide an explanation of the basic moral issues of international relations. By taking WHO Global Malaria Programme (GMP) as a case, and cosmopolitanism as one stream of normative theory as approach, this paper seeks to challenge the establishment steadfast realist theorists. This paper has a result that concern and commitment of countries in tackling the global malaria outbreaks through WHO-GMP show that countries turned out to have a moral aspect to act against other countries, including individuals who live in it.*

**Key Words: WHO-GMP, Cosmopolitanism**

## Pendahuluan

Dalam perspektif realisme hubungan internasional senantiasa digambarkan sebagai dunia anarki yang diwarnai oleh negara-negara *selfish*, yang senantiasa mengejar *power* dan kepentingan nasionalnya, tanpa peduli akan kelangsungan hidup negara-negara lain (Steans & Pettiford, 2009). Pandangan realisme tersebut hingga saat ini masih menjadi pandangan yang cukup dominan dalam studi Hubungan Internasional. Meskipun demikian, berbagai kritik terhadap perspektif realisme senantiasa muncul seiring dengan adanya berbagai fenomena baru yang terjadi dalam hubungan internasional. Salah satunya ialah kritik dari teori-teori normatif yang menganggap realisme sebagai suatu perspektif yang mengabaikan adanya etik dalam hubungan internasional (Jackson & Sorensen, 2005).

Teori-teori normatif sendiri merupakan teori-teori yang hirau akan apa yang seharusnya dilakukan oleh negara-negara dalam hubungan internasional (Jackson & Sorensen, 2005). Kemunculan teori-teori normatif ini seakan menandai kembalinya ide klasik Wilsonian. Hanya saja, berbeda dengan ide Wilsonian yang hanya berfokus pada nilai, berupa penekanan tentang pentingnya pembentukan institusi internasional untuk menciptakan dunia yang lebih damai, teori-teori normatif mempunyai cakupan lebih luas, yang tidak hanya melibatkan nilai, tetapi juga fakta. Teori-teori normatif dengan demikian tidak hanya hirau mengenai apa yang seharusnya, tetapi juga berupaya untuk menjelaskan, khususnya berkaitan dengan isu-isu moral dasar dari hubungan internasional (Jackson & Sorensen, 2005).

Kemunculan teori-teori normatif sebagai penantang realisme didukung oleh fenomena berakhirnya Perang Dingin yang membuat isu-isu global tidak hanya berpusat pada persoalan keamanan, tetapi juga mencakup persoalan lain seperti, ekonomi, kesejahteraan, lingkungan, terorisme, genosida, narkoba hingga penyebaran wabah penyakit (White, Little, & Smith, 1997). Keberadaan isu-isu tersebut membuat negara-negara memiliki peluang untuk saling bekerjasama dan membentuk tata kelola global guna menangani permasalahan-permasalahan yang menjadi persoalan bersama. Meskipun realisme masih tetap skeptis dengan hal-hal yang melatarbelakangi sikap negara-negara, akan tetapi motif etik tentu saja tidak dapat dilepaskan jika melihat upaya negara-negara dalam membangun tata kelola global, apalagi yang berkaitan dengan persoalan penyebaran wabah penyakit.

Tulisan ini merupakan respon atas pendirian teguh para teoritis realis yang memandang hubungan internasional sebagai dunia anarki yang berisikan negara-negara *selfish* yang

senantiasa mengejar kepentingan nasionalnya, tanpa peduli akan kelangsungan hidup negara-negara lain. Dengan mengambil studi kasus mengenai WHO Global Malaria Program (WHO GMP), tulisan ini akan memaparkan bahwa hubungan internasional bukanlah suatu hubungan yang didalamnya senantiasa diwarnai oleh perlombaan pencapaian kepentingan nasional oleh negara-negara *selfish*. Dalam hal ini, kepentingan nasional tentunya merupakan kepentingan guna memenuhi kesejahteraan masyarakatnya, tanpa hirau akan apa yang terjadi terhadap masyarakat negara lain, karena dalam pandangan realis, negara dianggap sebagai aktor yang *selfish*, yang senantiasa mementingkan dirinya sendiri. Tesis dasar tulisan ini ialah keberadaan WHO GMP merupakan salah satu bentuk kepedulian negara-negara dalam menaggulangi permasalahan penyebaran wabah malaria global. Dengan memakai konsep kosmopolitanisme, keberadaan WHO-GMP menunjukkan bahwa negara-negara bukanlah aktor yang senantiasa *selfish*, yang hanya memikirkan pemenuhan kepentingan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memiliki kepedulian akan permasalahan global, seperti penyebaran wabah malaria yang tentunya juga memberikan efek di lebih dari satu negara.

Tulisan ini selanjutnya akan mengikuti alur sebagai berikut. Bagian pertama akan membahas tentang kosmopolitanisme sebagai sebuah gagasan normatif dan perdebatan yang terjadi didalamnya. Perdebatan tersebut berkaitan dengan pola penyelesaian masalah secara global yang terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan yang bersifat “top down” dan “bottom up”, dimana tulisan ini akan memakai pendekatan “top down” dalam melihat upaya penanggulangan masalah global. Bagian selanjutnya akan membahas tentang keterkaitan WHO-GMP dengan kosmopolitanisme. Bagian terakhir adalah kesimpulan.

### **Gagasan kosmopolitanisme sebagai dasar tindakan negara-negara**

Salah satu aliran pemikiran dalam teori-teori normatif adalah kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme merupakan gagasan normatif yang berfokus pada manusia individu sebagai unit politik dan moral paling penting (Jackson & Sorensen, 2005). Gagasan ini memungkinkan tiap-tiap individu memiliki kesadaran bersama akan *world citizenship*, tanpa menghiraukan adanya *border* yang memisahkan mereka satu sama lain. Jika gagasan kosmopolitanisme ini, berkembang pada masa lampau, maka gagasan normatif tersebut akan akrab dengan sebutan gagasan utopis. Akan tetapi, dengan berkembang pesatnya teknologi dan informasi, yang memungkinkan terjadinya *distanciation* dan meningkatnya interaksi setiap individu di berbagai

belahan dunia, maka peluang terbentuknya kesadaran *world citizenship* semakin besar. Kosmopolitanisme dengan demikian tidak lagi menjadi suatu gagasan yang utopis.

Sebagai salah satu aliran dari teori-teori normatif, gagasan kosmopolitanisme hirau akan pertanyaan tentang bagaimana menciptakan dunia yang ideal (Jackson & Sorensen, 2005). Munculnya pertanyaan tersebut setidaknya dapat dilihat dari sebab-sebab berikut, *pertama*, pasca berakhirnya Perang Dingin, isu-isu global tidak hanya berkutat pada persoalan keamanan, tetapi telah mengalami pergeseran secara lebih luas. Perhatian yang lebih dalam akan isu-isu baru seperti isu kesejahteraan, lingkungan, hingga penyebaran wabah penyakit merupakan efek dari desentralisasi isu global pasca Perang Dingin. *Kedua*, keberadaan isu-isu baru tersebut mengharuskan negara-negara untuk saling bekerjasama, mengingat persoalan seperti kesejahteraan, lingkungan, hingga penyebaran wabah penyakit ternyata tidak mampu ditangani sendiri oleh negara. Akan tetapi penanganan permasalahan global tersebut hanya akan berujung pada kegagalan, jika negara masih tetap berpegang teguh pada sifat *selfish*-nya, yang terus menolak untuk melihat sistem sosial keduniaan sebagai satu kesatuan (Miller, 2006).

Oleh karena itu, gagasan kosmopolitanisme menganjurkan negara-negara untuk meninggalkan sifat *selfish*-nya dan memiliki kepedulian akan berbagai permasalahan global yang ada. Sebagai gagasan yang menekankan pentingnya individu, kosmopolitanisme mengharuskan negara-negara untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, negara-negara mesti memiliki kepedulian terhadap semua individu, terlepas warga negaranya atau bukan. Penekanan terhadap pentingnya nilai-nilai kemanusiaan membuat *border* pemisah antar negara tidak lagi relevan untuk dijadikan sebagai pembeda utama antara individu yang satu dengan yang lain, begitupun dengan latar belakang, suku, ras, dan agama. Karena itu kosmopolitanisme mengharuskan negara-negara untuk mengayomi semua individu, tanpa memandang status kewarganegaraan, suku, ras, maupun agama.

Pada perkembangannya gagasan kosmopolitanisme ini terpecah menjadi dua kubu, khususnya berkaitan dengan cara yang dipakai dalam mewujudkan perluasan kebebasan dan kewajiban moral antar individu (Chochran, 2004). Cara pertama sering disebut dengan pendekatan “bottom up”. Menurut Chris Brown, pendekatan ini berfokus pada manusia individu dan komunitas manusia keseluruhan sebagai unit dari politik dunia yang mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita dari gagasan kosmopolitanisme. Pendekatan “bottom up” mengedepankan pengutamaan peranan aktor non-negara, seperti individu, kelompok, atau

gerakan sosial global. Adapun cara kedua merupakan pendekatan yang bersifat “top down”. Pendekatan ini menurut Brown berfokus pada komunitas politik, yang terdiri dari negara-negara berdaulat yang mengemban tanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita dari gagasan kosmopolitanisme (Jackson & Sorensen, 2005). Peranan negara, berdasarkan pendekatan ini, dapat dilihat dari berbagai rezim internasional dalam penanganan isu-isu baru dalam hubungan internasional, yang banyak muncul pasca berakhirnya Perang Dingin.

Kompleksitas permasalahan global seperti kesejahteraan, kerusakan lingkungan, hingga penyebaran wabah penyakit membuat negara-negara memilih untuk membentuk rezim dan tata kelola dalam menangani masalah-masalah global, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa sebelum Perang Dingin, upaya tata kelola global oleh negara-negara sama sekali tidak ada. Hanya saja, permasalahan seperti kerusakan lingkungan hingga penyebaran wabah penyakit, pada saat itu masih belum menjadi agenda utama, karena masih *tercover* oleh isu keamanan, khususnya berkaitan dengan hubungan dua adidaya, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (White, Little, & Smith, 1997). Kompleksitas permasalahan global pasca Perang Dingin, dengan demikian tidak hanya melahirkan tata kelola baru yang dibentuk oleh negara-negara, akan tetapi juga memunculkan keseriusan negara-negara untuk lebih berkomitmen dalam menangani permasalahan global, meskipun dengan memakai tata kelola yang sebelumnya sudah ada.

### **WHO-Global Malaria Program sebagai wujud kosmopolitanisme negara-negara**

Kepedulian negara-negara terhadap negara-negara lain yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan sebenarnya telah ada jauh sebelum berakhirnya Perang Dingin. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan berbagai rezim internasional yang berupaya melakukan tata kelola global terkait permasalahan-permasalahan seperti kesejahteraan hingga penyebaran wabah penyakit. Salah satu bentuk tata kelola global yang menunjukkan kepedulian negara akan nilai-nilai kemanusiaan ialah *World Health Organization* (WHO). WHO sendiri merupakan organisasi negara-negara yang berfungsi mengurus masalah kesehatan masyarakat dunia ([www.who.int/about/en/](http://www.who.int/about/en/)). Keberadaan WHO ini secara langsung memperlihatkan bahwa negara-negara ternyata memiliki semangat kosmopolitanisme.

Sebagai organisasi yang berada dibawah payung PBB, WHO bukan organisasi yang hanya sekedar formalitas belaka. Dalam perjalanannya, organisasi ini memiliki berbagai program

yang berupaya untuk membantu berbagai permasalahan kesehatan, khususnya di negara-negara yang wilayahnya rentan akan adanya wabah penyakit. Salah satu program dari WHO ialah WHO-Global Malaria Program (WHO-GMP). Program yang diadakan oleh organisasi yang bermarkas di Jenewa sejak tahun 1955 tersebut bertanggung jawab mengendalikan dan menghilangkan wabah malaria di seluruh negara dunia ([www.who.int/malaria/about us/en/index.html](http://www.who.int/malaria/about_us/en/index.html)). Selain itu, program tersebut juga menetapkan pedoman-pedoman guna mendukung negara-negara endemik yang menjadi tempat menyebarnya wabah malaria ke seluruh dunia, dimana berdasarkan laporan tahunan WHO, negara-negara endemik, mayoritas merupakan negara-negara berkembang yang berada di kawasan tropis ([http://www.who.int/malaria/world\\_malaria\\_report\\_2011/](http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/)). Keberadaan program ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar WHO yang menyebutkan bahwa “*the enjoyment of the highest attainable standard of health as one of the fundamental rights of every human being without distinction*” ([www.who.int/about/en/](http://www.who.int/about/en/)). Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar WHO dalam menelurkan berbagai program penanganan masalah kesehatan yang salah satunya ialah WHO-GMP.

WHO-GMP pada awalnya gencar mengkampanyekan pentingnya penanggulangan wabah malaria melalui program WHO-Global Malaria Eradication Program. Dalam perkembangannya WHO-GMP ini kemudian tidak hanya berkutat pada program kampanye dan sosialisasi. Sejak tahun 2005, WHO-GMP berupaya membuat *progress report* tiap tahun berkaitan dengan penanganan kasus penyebaran wabah malaria di negara-negara tropis, khususnya negara-negara Afrika ([www.who.int/malaria/about us/en/index.html](http://www.who.int/malaria/about_us/en/index.html)). *Progress Report* tersebut secara umum berisi tentang gambaran yang komprehensif mengenai kemajuan dalam perang melawan malaria. Upaya WHO-GMP dalam memberantas wabah malaria tidak berhenti sampai disitu. Tahun 2011, WHO-GMP didesain ulang melalui pembentukan Malaria Policy Advisory Committee (MPAC) sebagai komite penasihat kebijakan malaria yang berfungsi memberikan saran dan rekomendasi kebijakan bagi WHO dalam upaya memberantas wabah malaria ([www.who.int/entity/malaria/mpac/en/](http://www.who.int/entity/malaria/mpac/en/)).

Dalam upaya menanggulangi dan menghapuskan malaria, WHO-GMP menjalankan program-programnya melalui empat tahapan. Tahapan pertama ialah sosialisasi dan pemberian panduan-panduan praktis penanganan malaria kepada negara-negara endemik. Tahap kedua berupa pembuatan *progress* penanggulangan malaria global. Penilaian dalam pembuatan



*progress* ini melihat pada apakah wabah malaria di negara-negara endemik berhasil dimusnahkan. Tahap ketiga ialah pendekatan terhadap negara-negara endemik guna mengatasi malaria. Tahap keempat ialah mengidentifikasi penyebab timbulnya wabah malaria, dan mengusahakan solusi untuk menangani permasalahan penyebaran wabah malaria ([www.who.int/malaria/about\\_us/en/index.html](http://www.who.int/malaria/about_us/en/index.html)).

Keseriusan program penanggulangan malaria oleh WHO pada prakteknya membuahkan hasil dengan semakin berkurangnya jumlah negara yang menjadi tempat penyebaran wabah malaria. Ini dapat dilihat dari penurunan jumlah negara endemik malaria. Sebagaimana laporan *The World Report Malaria*, pada tahun 2011, negara endemik malaria berjumlah 106 ([www.who.int/malaria/world\\_malaria\\_report\\_2011/en/index.html](http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/en/index.html)). Adapun pada tahun 2012, negara endemik malaria berkurang menjadi 104 ([www.who.int/malaria/publications/world\\_malaria\\_report2012/en/index.html](http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report2012/en/index.html)). Keberadaan WHO-GMP, dengan demikian memperlihatkan bahwa negara-negara ternyata mampu berperan sebagai aktor utama dalam mewujudkan dunia yang kosmopolit. Kosmopolitanisme negara-negara melalui WHO-GMP ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya upaya-upaya dalam menanggulangi permasalahan penyebaran wabah malaria sebagai persoalan global. Komitmen negara-negara untuk mengeliminasi malaria, menunjukkan bahwa negara-negara, dalam payung WHO, ternyata mampu bertindak secara kolektif guna menanggulangi malaria yang menyerang individu-individu di negara-negara lain.

Komitmen negara-negara tersebut diperkuat oleh adanya *Global Malaria Action Plan* (GMAP) yang mulai berlaku pada tahun 2016. Keberadaan GMAP ini tidak dapat dilepaskan dari peranan MPAC, dimana GMAP sendiri merupakan suatu program yang menargetkan pemberantasan malaria secara besar-besaran guna mengurangi negara endemik secara drastis ([www.who.int/malaria/about\\_us/en/index.html](http://www.who.int/malaria/about_us/en/index.html)). Hal ini menunjukkan bahwa WHO, yang terdiri dari negara-negara di dunia semakin serius dalam menangani permasalahan penyebaran wabah malaria di negara-negara endemik. Dengan demikian sikap negara-negara yang selama ini selalu dihalangi oleh identitas dan *border*-nya satu sama lain tentu saja menjadi tidak relevan jika melihat pada besarnya komitmen mereka dalam menangani permasalahan malaria.

Komitmen negara-negara dalam menangani permasalahan penyebaran wabah malaria seakan memperkuat gagasan kosmopolitanisme yang mengharuskan negara memiliki kepedulian terhadap semua individu, terlepas warga negaranya atau bukan. Program WHO-GMP memperlihatkan bahwa negara-negara ternyata masih memiliki aspek moral dalam tindakannya,



dimana mereka secara sukarela bersedia, setidaknya untuk mendukung pelaksanaan penyebaran wabah malaria di negara-negara yang menjadi tempat menyebarnya wabah tersebut, atau negara-negara endemik. Aspek moral tindakan negara-negara ini tentunya sangat bertentangan dengan pandangan perspektif realisme yang menganggap negara-negara senantiasa bertindak hanya untuk memenuhi kepentingannya semata, tanpa hirau akan negara-negara yang lainnya.

Penekanan pandangan kaum realis tentang sikap *selfish* negara dalam melihat hubungan internasional ini dimentahkan oleh adanya bukti nyata berupa kepedulian negara-negara dalam memberantas penyebaran wabah malaria global. Lebih jauh dari itu, komitmen negara-negara dalam memberantas penyebaran wabah malaria global semakin menunjukkan bahwa gagasan kosmopolitanisme yang mengharuskan negara-negara untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mengayomi semua individu, tanpa memandang status kewarganegaraan, suku, ras, maupun agama, bukan lagi menjadi suatu hal utopis. Upaya dan komitmen negara-negara dalam membentuk dan menjalankan tata kelola global penanganan malaria, dengan demikian menunjukkan bahwa ternyata mereka masih memiliki aspek moral dalam tindakannya terhadap negara-negara lain beserta individu-individu yang didalamnya.

### **Kesimpulan**

Selama ini perspektif realis memandang bahwa hubungan internasional senantiasa diwarnai oleh tindakan negara-negara *selfish* yang hanya bertujuan untuk mencapai kepentingannya sendiri, tanpa hirau akan negara-negara lain. Keberadaan WHO-GMP ternyata menunjukkan bahwa negara-negara tidaklah selalu mengutamakan tindakan *selfish*-nya. Setelah berakhirnya Perang Dingin, komitmen negara-negara dalam WHO-GMP guna menanggulangi penyebaran wabah malaria global semakin terlihat dengan keseriusan mereka melalui pengadaan program-program baru seperti pengadaan *progress report* tiap tahun sejak tahun 2005, upaya pengurangan jumlah negara-negara endemik yang menjadi tempat menyebarnya wabah malaria, serta pembentukan MPAC dan penyusunan GMAP yang menargetkan pemberantasan wabah malaria secara besar-beesaran di negara-negara endemik. Kepedulian dan komitmen negara-negara dalam menanggulangi penyebaran wabah malaria global juga memperlihatkan bahwa negara-negara ternyata juga memiliki aspek moral dalam tindakannya terhadap negara-negara lain beserta individu-individu yang didalamnya. Hal ini sangat sesuai dengan gagasan

kosmopolitanisme yang mengharuskan negara-negara untuk mengayomi semua individu, tanpa memandang status kewarganegaraan, suku, ras, maupun agama.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Chochran, M., *Normative Theory in International Relations: A Pragmatic Approach*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004

<sup>2</sup>  
Hara, A.E., *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2011

Jackson, R., dan Sorensen G., *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Mas'oed, M., *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, 1990

Miller, L.H., *Agenda Politik Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Steans J. dan Pettiford L., *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

<sup>3</sup>  
White, B., Little R., and Smith M. (ed), *Issues in World Politics*, London, Macmillan Press Ltd, 1997

### Internet:

<http://www.who.int/about/en/>, diakses pada 22 Mei 2016

<http://www.who.int/entity/malaria/mpac/en/>, diakses pada 22 Mei 2016

<sup>1</sup>  
[http://www.who.int/malaria/about\\_us/en/index.html](http://www.who.int/malaria/about_us/en/index.html), diakses pada 22 Mei 2016

[http://www.who.int/malaria/publications/world\\_malaria\\_report\\_2012/en/index.html](http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2012/en/index.html), diakses  
pada 22 Mei 2016

<sup>1</sup>  
[http://www.who.int/malaria/world\\_malaria\\_report\\_2011/en/index.html](http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/en/index.html), diakses pada 22 Mei  
2016

[http://www.who.int/malaria/world\\_malaria\\_report\\_2011/WMR2011\\_countryprofiles\\_lowres.pdf](http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/WMR2011_countryprofiles_lowres.pdf),  
diakses pada 22 Mei 2016

# WHO-Global Malaria Program Sebagai Wujud Kosmopolitanisme Negara-Negara

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[malariajournal.biomedcentral.com](http://malariajournal.biomedcentral.com)

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

1%

3

Submitted to Oxford Brookes University

Student Paper

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%